laporan akhir Penelitian

Universitas Bakrie

Tahun 2022

Judul Penelitian:

**Peran Tata Kelola Perpajakan dalam Mengatasi Penggelapan Pajak yang Merugikan Negara**

Bidang Penelitian

Akuntansi/Keuangan

oleh

RENE JOHANNES



Universitas Bakrie

Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta, 12920

Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian

tahun 2022

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Judul Penelitian:
 | : Peran Tata Kelola Perpajakan dalam Mengatasi  Penggelapan Pajak yang Merugikan Negara |
| 1. Peneliti Utama
 |  |
| * 1. Nama Lengkap
 | : Rene Johannes |
| * 1. Jenis Kelamin
 | : Laki-laki |
| * 1. Pangkat/Golongan/NIDN
 | : Asisten Ahli/3A/0314115902 |
| * 1. Bidang Keahlian
 | : Akuntansi/Keuangan |
| * 1. Program Studi
 | : Akuntansi |
| 1. Tim Peneliti
 |  |
|  |  |
| No | Nama | Bidang Keahlian | Program Studi |
| 01. | Rene Johannes | Akuntansi/Keuangan | Akuntansi |
| - | - | - | - |
|  |  |
| 1. Jangka Waktu Penelitian dan Pendanaan
 |  |
| * 1. Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan
 | : 3 (tiga) bulan |
| * 1. Biaya Total yang Diusulkan
 | : Rp19.826.000,00 |
| * 1. Biaya yang Disetujui
 | : Rp19.826.000,00 |

Jakarta, 17 Maret 2022

Menyetujui,

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan | Peneliti Utama |
|  |  |
| (Deffi Ayu Puspito Sari, S.TP.,M.Agr.Sc.,Ph.D., IPM) | (Dr. Rene Johannes, SE., M.Si., MM, M.Si., Ak., CA., CPMA, CPA (Aust.), CSCA, ASEAN-CPA, CSRA) |
| NIDN: 0308078203 | NIDN: 0314115902 |

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan Tax Evasion (Penggelapan Pajak) baik dari Wajib Pajak itu sendiri maupun kebijakan pemerintah yang telah diterapkan, termasuk upaya untuk mengatasinya menggunakan Artificial Intelligence dan Tata-Kelola yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menggunakan data sekunder, data yang bersumber dari literatur dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dan sumber yang relevan. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan Penggelapan Pajak dengan melakukan pencarian kata kunci, pencarian subjek, pencarian kutipan ilmiah, buku-buku, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, narasumber, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan Penggelapan Pajak yaitu efektivitas dari penerapan Self Assessment System, dan kebijakan pemerintah dalam mengatur besarnya tarif pajak yang berlaku menjadi tolok ukur dari nilai pembayaran pajak.

Kata Kunci: artificial intelligence, self assessment system, tax evasion, tata-kelola

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul.............................................................................................. 01

Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian Tahun 2022................................ 02

Abstrak............................................................................................................ 03

Daftar Isi.......................................................................................................... 04

Bab I : Pendahuluan..................................................................................... 05

Bab II : Tinjauan Pustaka.............................................................................. 07

Bab III : Metode Penelitian............................................................................. 09

Bab IV : Hasil dan Pembahasan...................................................................... 10

Bab V : Kesimpulan....................................................................................... 15

Daftar Pustaka................................................................................................... 16

Lampiran........................................................................................................... 21

Rancangan Anggaran Biaya............................................................................... 22

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Sebagaimana yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak dan korupsi pajak. Dimana tax avoidance diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dan ketidak-lengkapan peraturan pendukung dan Undang-Undang (UU) pajak yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. Kata penggelapan pajak sebenarnya sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, khususnya di lingkungan dunia usaha. Seringkali penggelapan pajak itu terjadi karena adanya kerja sama antara petugas pajak, WP, dan pengelola perusahaan.

Berkaitan dengan Pola Perbandingan Tax Avoidance dan Tax Evasion, Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan tahap awal perencanaan kegiatan perusahaan dikaitkan dengan pembuatan Business Plan untuk setiap tahunnya. Perencanaan pajak dibuat untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan menggunakan strategi yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Perpajakan. Perencanaan Pajak sendiri ada yang bersifat defensif, dan agresif yang terdiri atas: Transfer Pricing, Treaty Shopping, Controlled Foreign Compa- ny Rules (CFC) serta Thin Capitalization. Termasuk pula beberapa skema lainnya yang belum diidentifikasi oleh pihak regulator yang secara legalitas masih dapat diterima.

Selanjutnya untuk Penghindaran Pajak terdapat 2 (dua) pola, yaitu Acceptable dalam arti bisa diterima penerapannya. Penghindaran Pajak mempunyai sifat ambigu antara legal atau ilegal, sedangkan Penggelapan mempunyai sifat ilegal. Tidak hanya demikian, dalam praktiknya pengelompokan keduanya biasa terjadi atas dasar interpretasi otoritas pajak dalam masing-masing negara yang bersangkutan. Maka itu untuk dapat menyimpulkannya yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penghindaran pajak ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh para WP saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum dikeluarkan dan secara tidak langsung WP yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. Di beberapa negara Penghindaran Pajak sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan Beban Pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya Penghindaran Pajak ini mempunyai sifat yang sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apa pun, tetapi mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia.

Menurut ahli James Kessler (kessler.co.uk), Penghindaran Pajak dapat ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable*). Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan melakukan transaksi palsu.

Tidak hanya James Kessler, Palan (2010) menyebutkan bahwa suatu kegiatan yang dikatakan sebagai Penghindaran Pajak apabila melakukan salah satu tindakan seperti WP membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan celah interpretasi dan ketidaklengkapan aspek hukum, WP berusaha agar pajak yang terutang dikenakan atas keuntungan yang telah dibuat dan bukan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan WP sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutangnya.

Pada beberapa negara sudah terdapat Anti Tax Avoidance Rules (Ketentuan Anti Peng- hindaran Pajak), baik yang bersifat umum (GAAR - General Anti Avoidance Rules) maupun yang bersifat khusus (SAAR - Specific Anti Avoidance Rules). Pada prinsipnya kedua ketentuan tersebut adalah untuk memerangi usaha Penghindaran Pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari perpajakan yang berdampak pula pada mengecilnya Rasio Perpajakan. Sedangkan pada praktik Penggelapan Pajak sudah dapat dipastikan merupakan suatu tindakan kriminal.

 Menurut Masri dan Martani (2012) Penggelapan Pajak adalah berbagai usaha untuk memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku penggelap- an dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana karena melanggar undang-undang. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal, yaitu para WP sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang seharusnya menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap atau tidak benar.

Penggelapan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di mancanegara. Walaupun sanksi yang dikenakan sudah sangat berat masih ada saja pihak yang melanggar. Berikut contoh penggelapan pajak yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu pengusaha teknologi asal Texas Robert T. Brockman didakwa atas kasus penggelapan pajak senilai USD2 miliar atau setara Rp29 triliun (kurs Rp14.740,00). Menurut penegak hukum AS, penggelapan pajak yang dilakukan Brockman menjadi yang terbesar di AS. Dikutip dari CNN, Senin (19/10/2020) CEO perusahaan perangkat lunak Reynolds & Reynolds itu didakwa atas tuduhan menggelapkan pendapatan oleh Internal Revenue Service (IRS) senilai USD2 miliar selama 20 tahun. Selain itu, Brockman juga dituduh telah menipu investor sebesar USD68 juta. Dakwaan diajukan awal bulan Maret 2012 di Distrik Utara California. Sederet tuduhan terhadap Brockman termasuk dirinya yang telah mengoperasikan jaringan kompleks perusahaan asing dalam rekening banknya. Dia juga menciptakan sebuah sistem email terenkripsi dan menggunakan berbagai kata sandi seperti Permit, Red Fish, dan Snapper dalam berkomunikasi. Selain itu, ia juga menggunakan Pendapatan Kena Pajak (PhKP) yang tidak dilaporkan yang untuk membeli kapal pesiar mewah Turmoil. Brockman juga dituduh telah meminta manajer keuangannya untuk menghadiri konferensi pencucian uang (*money laundry*) dengan identitas samaran dan membujuk pengelola uang untuk menghancurkan dokumen dan media elektronik dengan palu, seperti dikutip dari Suryani Susanto dalam detikfinance.com (2020).

Selanjutnya, Penggelapan Pajak juga terjadi di Jepang, yaitu pemilik studio animasi Jepang terbukti melakukan penggelapan pajak senilai JPY138 juta atau setara Rp17 miliar. Pemilik rumah produksi serial ternama Demon Slayer tersebut ditengarai menggelapkan pajak perusahaan dan pajak penjualan. "Pengadilan Distrik Tokyo menyatakan Hikaru Kondo, Presiden Ufotable Inc., bersalah dengan menyembunyikan penghasilan perusahaan sebesar JPY400 miliar untuk tahun pajak yang berakhir pada Agustus 2015, Agustus 2017, dan Agustus 2018," tulis Tax Notes International. Akibatnya, Kondo harus melaksanakan hukuman 20 (dua puluh) bulan di penjara dengan penangguhan 3 (tiga) tahun. Tidak hanya itu, perusahaannya pun harus membayar denda sebesar JPY30 juta atau setara Rp3,7 miliar. Dalam artikel yang dipublikasikan The Japan Times, Hakim Akiyuki Tanaka menyatakan bahwa Kondo memiliki niat yang kuat untuk menggelapkan pajak. Kondo bahkan meminta istrinya yang bertanggung jawab atas pengelolaan akuntansi perusahaan untuk memalsukan isi laporan keuangan. Pada sidang sebelumnya, Kondo mengakui perbuatannya mengge-lapkan pajak. "Saya kira perusahaan tak akan terlibat dalam masalah dan menggelapkan pajak. Saya minta maaf", ucapnya. Setelahnya, Ufotable menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah. Perusahaannya akan melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun pajak 2018 dan akan membayar pajak terutang secara penuh termasuk sanksi denda dan bunga. Perusahaan juga berjanji akan mematuhi aturan yang ada serta memperbaiki manajemen perusahaan, seperti yang dikutip oleh Syadesa Anida Herdona dalam news.ddtc.co.id (2021).

Banyaknya kasus Penggelapan Pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya kasus penggelapan pajak disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau juga menyalahgunakan kepemilikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), lalu tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. DJP bersama Kemenkeu dapat meningkatkan mutu pelayanan pajak dengan cara mengedukasi WP untuk selalu taat dan patuh dalam memenuhi peraturan pajak yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak dan memberikan kemudahan bagi para WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sejak dimulainya reformasi perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia sudah banyak berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Seperti halnya dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 1983 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu perubahan pertama UU No. 9 Tahun 1994, perubahan kedua UU No 16 Tahun 2000, perubahan yang ketiga UU No. 28 Tahun 2007, dan perubahan keempat UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Self Assessment System menurut Resmi (2014), adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kesempatan kepada WP dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan dan UU Perpajakan yang berlaku. WP diberi kepercayaan penuh dan dianggap mampu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan dan UU perpajakan.

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus memberi-kan kepastian kepada WP tentang berapa jumlah pajak yang terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari aparat atau pemungut pajak. Jika sistem perpajakan tidak transparan dan tidak adil maka kecenderungan WP melakukan kecurangan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pematasari (2013), serta Ningsih dan Pusposari (2015) menyebutkan bahwa pengaruh hubungan antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak bersifat negatif, semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang WP, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum memadai untuk mengakomodasi segala kepentingannya.

Penyebab tindakan penggelapan lainnya yaitu karena WP kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan (Resmi, 2014). Agar Self Assessment System dapat berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Menurut Mardiasmo (2013), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan dan UU Perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan sehingga dapat mendeteksi Penggelapan Pajak yang dilakukan WP. Apabila frekuensi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak cukup tinggi, WP akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang ada. Dalam hal ini berarti pemeriksaan pajak dapat menurunkan tingkat kecurangan pajak, karena apabila WP takut diperiksa oleh aparat pajak dan ternyata terbukti, maka dana yang akan dikeluarkan oleh WP untuk membayar denda lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dibayar (Ayu, 2013).

Penyebab lain terjadinya tindakan Penggelapan Pajak adalah faktor tarif pajak. Tarif pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran (Brotodihardjo, 2010). Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap 2 (dua) orang mempunyai hak yang sama sehingga tercapai tarif pajak yang proposional atau sebanding (Rahayu, 2017). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penggelapan pajak yaitu tingginya tarif pajak, pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi WP dalam hal pembayaran pajak.

Beberapa penelitian mengenai tindakan penggelapan telah dilakukan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu (2013) dengan 1 (satu) variabel, yaitu persepsi efektifitas pemeriksaan pajak terhadap kecenderungan melakukan perlawanan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang di berbagai tempat. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2015) dengan satu variabel, yaitu persepsi terhadap Self Assessment System sebagai tindakan Penggelapan Pajak pada WPOP yang terdaftar di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penelitian ini merupakan pengulangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Penulis lebih cenderung untuk mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Diska (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tindakan Tax Evasion” yang membedakan penelitian ini adalah penulis ingin melakukan pendalaman Penggelapan Pajak terhadap variabel yang menganalisis tarif pajak yang berlaku.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Indikator Penggelapan Pajak**

Menurut Zain (2017) penggelapan pajak mempunya 3 (tiga) indikator yang harus dipahami, yaitu:

1. Tidak Menyampaikan SPT dan Menyalahgunakan NPWP;

WP dengan sengaja menyalahgunakan NPWP yang telah didaftarkan pada KPP dan tidak menyampaikan SPT sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

2. Menyampaikan SPT dengan Isi yang Tidak Benar.

Di sini peran WP harusnya menghitung, membayar dan melaporkan SPT sesuai dengan yang seharusnya.

3. Berusaha Menyuap Aparat Pajak;

Setelah WP dicurigai terdapat penggelapan pajak maka WP tersebut akan melakukan upaya upaya seperti menyuap aparat pajak yang akan memeriksa pajak dari WP tersebut.

**Penyebab Penggelapan Pajak**

Menurut Rahayu (2017), penyebab terjadinya penggelapan pajak adalah:

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan) masing-masing individu akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan Aparat Pajak yang Mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan WP untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan WP yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan WP dan membantu WP dalam perpajakannya, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh aparat pajak. Namun, jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha WP, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya Tarif Pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi WP dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. WP ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena masyarakat tidak ingin apa yang diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

Pada The Laffer Curve yang dikembangkan oleh Arthur Laffer menunjukkan bahwa perlu perhitungan yang cermat dalam menetapkan tarif pajak yang jika terlalu akan terjadi Penggelapan Pajak yang dilakukan oleh para WP sehingga akan menurunkan penerimaan jumlah pajak. Kesalahan di dalam menentukan tarif pajak akibatnya tetap negatif, termasuk jika lebih rendah daripada kemampuan para WP.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Buruk.

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara, dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan teratur. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak.

**Akibat Penggelapan Pajak**

Menurut Gunadi (2008), ada beberapa akibat dari perbuatan penggelapan pajak, yaitu:

1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak merupakan pusat kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara berbagai konsekuensi dan anggaran lain yang berhubungan, seperti keadaan inflasi, kenaikan tarif pajak, dll.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Selanjutnya akan sangat mengganggu “Level Playing Field”, ketidakseimbangan dalam persaingan.

3. Dalam Bidang Psikologi

Jika WP terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasa-kan untuk selalu melanggar undang-undang. Karena tujuan WP dalam menggelapkan pajak pasti untuk mencari keuntungan (laba setelah pajak) yang lebih besar dengan cara Penghasilan Kena Pajak.

**Pencegahan Tindakan Penggelapan Pajak**

Adapun cara-cara mencegah WP melakukan Penggelapan Pajak antara lain:

1. Pemeriksaan Pajak (Tax Audit) Pemeriksaan atau audit pajak dilakukan oleh petugas untuk menyelidiki dan mengawasi setiap WP;

2. Integrasi Sistem Informasi Pencegahan ini berupa dialog dan saling tukar pandangan antara WP dan aparat pajak yang harus tetap diadakan melalui berbagai sarana yang telah tersedia;

3. Administrasi Pajak cara pencegahan dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran, penetapan, dan penagihan WP.

**Pencegahan Penggelapan Pajak Menggunakan Artificial Intelligence**

Terdapat 10 (sepuluh) konsep yang dapat diterapkan dalam tindakan pencegahan, yaitu: (Volkenburgh, 2021)

1. Penggunakan Robotic Process Automation (RPA) yang dapat secara otomatis melaksanakan penugasan berulang (*repetitive task*) dalam melakukan pengawasan;

2. Penggunakan *machine learning* yang dapat mengekstraksi berbagai data kunci dari dokumen perpajakan, antara lain:

a. Membuat klasifikasi dokumen;

b. Mendefinisikan taksonomi dokumen;

c. Mengekstraksi data yang diperlukan dari suatu dokuen

3. Penggunakan machine learning dapat mengklasifikasi transaksi terkait perpa- jakan yang sensitif. Pengklasifikasian pajak merupakan aspek kunci baik un- tuk penjualan dan domain pajak properti. Pertama, perlu memperhatikan PPN. Diasumsikan akan dihasilkan produk atau jenis jasa yang baru. Agar dapat mengklasifikasikannya ke dalam suatu kategori perpajakan yang sesuai perlu mempertimbangkan 3 (tiga) hal:

a. Proses produksi atau pelaksanaan jasanya;

b. Dimana akan dijual; dan

c. Bagaimana proses pengirimannya.

4. Machine learning dapat digunakan untuk menganalisis peringatan khusus dari pihak aparat perpajakan;

5. Artificial Intelligence dalam auditing dapat digunakan untuk mengidentifikasi kasus potensial Penggelapan Pajak;

6. Artificial Intelligence dapat membantu untuk mengidentifikasi adanya ke- mungkinan pengurangan atau kredit pajak;

7. Robotic Process Automation (RPA) dan Artificial Intelligence dapat diguna- kan untuk memperbandingkan struktur harga agar lebih akurat dalam meng- hitung transfer pricing;

8. Artificial Intelligence dapat membuat perkiraan perhitungan pajak terutang menjadi lebih akurat;

9. Artificial Intelligence dapat membantu menentukan lokasi informasi kunci di dalam suatu/berbagai dokumen yang terkait perhitungan pajak;

10. Artificial Intelligence dapat membantu WP di dalam membuat keputusan yang strategis.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan tetap bersifat kuantitatif yang mendukung data yang berasal dari berbagai jurnal, catatan penulis dari observasi, termasuk dokumen pribadi narasumber sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Menurut Sugiyono (2014) metode pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai berbagai faktor yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini juga akan melakukan eksplorasi dan penggambaran dengan tujuan untuk dapat menerangkan hasil penelitian.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mencari sumber referensi penelitian dari berbagai sumber terpercaya menggunakan beberapa metode, seperti pencarian kata kunci, pencarian subjek, pencarian kutipan ilmiah, buku-buku, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, narasumber, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi litera- tur bersumber dari berbagai negara agar dapat dilakukan perbandingan mengenai berbagai teknik Penggelapan Pajak, termasuk cara penanganan untuk mencegah dan mengatasinya.

**Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini objek penelitian utama adalah peristiwa Penggelapan Pajak yang dilakukan oleh WP yang masuk ke dalam berita online, beritanya sudah ada diberbagai dan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai perusahaan serta didukung oleh literatur. Penanganannya sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari literatur atau menggunakan berbagai sumber lainnya dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber yang relevan. Dalam hal ini, digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia dan diolah sebelum dilakukan penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data sekunder digunakan sebagai pembanding yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel dan jurnal mengenai tindakan Penggelapan Pajak.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan Penggelapan Pajak, adapun hasil temuannya sebagai berikut ini. Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak agenda pembangunan diberbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan dana pembangunan yang besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan diberbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada Penerimaan Pajak.

Dalam mencermati permasalahan rendahnya jumlah wajib pajak yang seharusnya membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik PPh maupun PPN. Dalam hal ini rendahnya upaya WP baik WPOP maupun WP Badan dalam membayarkan dan melaporkan pajak terutang atas seluruh penghasilan yang diterima. Hal tersebut berdampak buruk bagi penerimaan pajak, serta WP dengan segala upaya selalu menghindari bahkan menggelapkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Karena sejatinya pembayaran pajak dilakukan secara paksa, baik WP setuju ataupun tidak, selama pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung untuk pembangunan Negara. Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dimana data yang diberikan dari informasi dan sumber yang relevan.

**Penerapan Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak**

Sumber-sumber penerimaan dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama penerimaan pajak berupa pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan NonMigas, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk dan pajak pungutan ekspor. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan NonMigas, penerimaan dari kegiatan privatisasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan dari bagian laba BUMN dan PNBP lainya. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi berperan penting dalam pembiayaan APBN tersebut karena sifatnya yang berkelanjutan (sustainable) dimana sepanjang perekonomian meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat.

Terdapat 3 (tiga) faktor utama penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu tarif pajak yang relatif tinggi, lemahnya aparat perpajakan, dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, rendahnya jumlah WP yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah WP potensial. Maka pada waktu mengadakan Reformasi Perpajakan tahun 1983, pemerintah dihadapkan pada masalah Domestic Gap Revenue (MGR) menjadi faktor yang sangat serius, keinginan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama sangat menonjol, maka kebijakan mendasar yang dipakai pemerintah pada saat itu adalah menerapkan Self Assessment System dan menghapus fasilitas-fasilitas di bidang perpajakan.

Hasil penting dari Reformasi Perpajakan tahun 1983 tersebut adalah penerimaan pajak benar-benar sudah menjadi penerimaan negara yang utama. Namun, kegagalan pada Reformasi Perpajakan pertama antara lain adalah Self Assessment System banyak disalahgunakan, baik oleh WP maupun aparat pajak yang tidak mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP, rendahnya penegakan hukum, dan kinerja aparat pajak yang masih rendah. Maka reformasi perpajakan berikutnya telah mengalami perubahan tujuan yang mendasar seperti pada Reformasi Perpajakan tahun 1994, di samping diarahkan untuk mempertahankan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, juga untuk meningkatkan fungsi pajak dalam mendorong kegiatan perekonomian, menitikberatkan penegakan hukum dan efisiensi pemungutan pajak. Namun, baru pada Reformasi Perpajakan tahun 2000 dimulai, sebuah reformasi secara total baik yang menyangkut tax policy, tax law, dan tax administration.

Salah satu indikasi bahwa efisiensi pemungutan pajak di Indonesia masih rendah ini adalah ditunjukkan oleh rendahnya Tax Ratio Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2017 Tax Ratio di Indonesia sebesar 14,6% masih jauh di bawah negara negara berkembang lainnya seperti Filipina (17,5%), Thailand (17,6%), dan Malaysia (18,5%). Masalah rendahnya partisipasi dan kesadaran warga negara Indonesia masih tetap ada, meskipun reformasi perpajakan sudah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai upaya untuk menaikkan Tax Ratio sudah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan kepatuhan para WP termasuk mengisi SPT dengan benar dan lengkap.

**BAB V**

**KESIMPULAN**

Pengaruh penerapan self assessment system dan tingginya tarif pajak terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dimana penulis menggunakan data sekunder, data yang bersumber dari literatur dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dan sumber yang relevan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Self Assessment System memiliki pengaruh terhadap tindakan Pengge- lapan Pajak. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia saat ini yaitu Self Assessment System dimana WP melakukan sendiri kegiatan perpajakannya se-hingga memungkinkan terjadinya tindakan Penggelapan Pajak maka diperlukan pengawasan agar WP tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang benar;

2. Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap tindakan Penggelapan Pajak. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia diklaim belum sesuai dengan harapan dari WP. Banyak dari WP yang mengeluhkan tarif yang diberlakukan terlalu tinggi sehingga berdampak pada WP itu sendiri dalam menyampaikan SPT secara tidak absah, dimana penghasilan yang tidak sebanding dengan tarif pajak yang berlaku membuat WP malah enggan untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak. Dengan kemungkinan penggunaan Artificial Intelligence dan Tata-Kelola yang baik pada masa mendatang diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya Penggelapan Pajak.

Pengaruh penerapan Self Assessment System dan tingginya tarif pajak terhadap tindakan Penggelapan Pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Self Assessment System dan tarif pajak mempengaruhi tindakan Penggelapan Pajak. Dengan penerapan Self Assessment System maka WP dengan leluasa dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta WP yang melakukan kewajibannya dengan benar dapat meningkatkan kepatuhan WP sehingga dapat mengurangi tindakan Penggelapan Pajak.

Meminimalkan tarif pajak maka WP akan sukarela membayar pajak yang terutang. Hal ini didukung oleh banyaknya WP yang akan membayarkan kewajiban perpajakannya dengan rutin. Serta peran Pemerintah dalam hal mengakomodasi fasilitas untuk WP agar memudahkan setiap WP yang akan membayarkan pajaknya secara benar. Pelayanan kepada WP termasuk hal yang paling penting dan dalam memberikan kemudahan sudah seharusnya masuk dalam Perpajakan Digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alrazi, B., De Villiers, C. & van Staden, C. J., (2015). A Comprehensive Literature Review on, and the Construction of a Framework for, Environmental Legitimacy, Accountability and Proactivity. Journal of Cleaner Production, No.102, pp. 44–57.

Atkins, J., Atkins, B., Thomson, I. & Maroun, W., (2015). ‘Good’ News from Nowhere: Imagining Utopian Sustainable Accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 28 Vol. (5), pp. 651–670.

Atkins, J. & Maroun, W., (2015). Integrated Reporting in South Africa in 2012: Perspectives from South African Institutional Investors. Meditari Accountancy Research, No. 23 Vol. (2), pp. 197–221.

Bebbington, J., Higgins, C. & Frame, B., (2009). Initiating Sustainable Development Reporting: Evidence from New Zealand. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 22 Vol. (4), pp. 588–625.

Brown, J. & Dillard, J., (2014). Integrated Reporting: on the Need for Broadening Out and Opening up. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 27 Vol. (7), pp. 1120–1156.

Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, J., (1980). The Roles of Accounting in Organizations and Society. Accounting, Organizations and Society, No. 5 Vol. (1), pp. 5–27.

Cahan, S., De Villiers, C., Jeter, D., Naiker, V. & Van Staden, C., (2016). Are CSR Disclosures Value Relevant? Cross-country evidence. European Accounting Review, No. 25 Vol. (3), pp. 579–611.

Churet, C. Eccles, R. G., (2014). Integrated Reporting, Quality of Management, and Financial Performance. Journal of Applied Corporate Finance, No. 26 Vol. (1), pp. 56–64.

Cooper, D., (1980). Discussion of Towards a Political Economy of Accounting. Accounting, Organizations and Society, No. 5 Vol. (1), pp. 161–166.

De Klerk, M. & De Villiers, C., (2012). The Value Relevance of Corporate Responsibility Reporting: South African Evidence. Meditari Accountancy Research, No. 20 Vol. (1), pp. 21–38.

De Klerk, M., De Villiers, C. & van Staden, C., (2015). The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure on Share Prices: Evidence from the United Kingdom. Pacific Accounting Review, No. 27 Vol. (2), pp. 208–228.

De Villiers, C. and Alexander, D., (2014). The Institutionalisation of Corporate Social Responsibility Reporting. The British Accounting Review, No. 46 Vol. (2), pp. 198–212.

De Villiers, C. J. & Barnard, P., (2000). Environmental Reporting in South Africa from 1994 to 1999: a Research Note. Meditari Accountancy Research, No. 8 Vol. (1), pp. 15–23.

De Villiers, C., Low, M. & Samkin, G., (2014a). The Institutionalisation of Mining Company Sustainability Disclosures. Journal of Cleaner Production, No. 84, pp. 51–58.

De Villiers, C. & Marques, A., (2016). Corporate Social Responsibility, Country-level Predispositions, and the Consequences of Choosing a Level of Disclosure. Accounting and Business Research, No. 46 Vol. (2), pp. 167–195.

De Villiers, C., Rinaldi, L. & Unerman, J., (2014b). Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 27 Vol. (7), pp. 1042–1067.

De Villiers, C., Venter, E. & Hsiao, P., (2017). Integrated Reporting: Background, Measurement Issues, Approaches and an Agenda for Future Research. Accounting & Finance.

Deegan, C., (2002). Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – a Theoretical Foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 15 Vol. (3), pp. 282–311.

Deloitte Konsultan Indonesia (2021). CEO Survey 2021: Survey on the Role of CEOs in Advancing Sustainability & ESG.

Dillard, J. & Reynolds, M., (2008). Green Owl and the Corn Maiden. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 21 Vol. (4), pp. 556–579.

Dumay, J., Guthrie, J. and La Torre, M., (2017). Barriers to Implementing the International Integrated Reporting Framework: A Contemporary Academic Perspective. Meditari Accountancy Research, No. 25 Vol. (4).

Eccles, R. G. & Krzus, M. P., (2010). One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy. Hoboken, NJ: Wiley. Published online October 2015, doi:10.1002/9789199960.

Flower, J., (2015). The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure. Critical Perspectives on Accounting, No. 27, pp. 1–17.

Gray, R., Kouhy, R. & Lavers, S., (1995). Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 8 Vol. (2), pp. 47–77.

GRI, (2016). Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards (2016). Available: www. globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/?g=ae2e23b8-4958-455ca9df-ac372 d6ed9a8 www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx [Accessed 10 February 2017].

Guthrie, J., Manes-Rossi, F. & Orelli, R. L., (2017). Integrated Reporting and Integrated Thinking in Italian Public Sector Organisations. Meditari Accountancy Research, No. 25 Vol. (4).

Guthrie, J. & Parker, L. D., (1989). Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory. Accounting and Business Research, No. 19 Vol. (76), pp. 343–352.

Higgins, C., Stubbs, W. & Love, T., (2014). Walking the Talk(s): Organisational Narratives of Integrated Reporting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 27 Vol. (7), pp. 1090–1119.

Hogner, R. H., (1982). Corporate Social Reporting: Eight Decades of Development at US Steel. Research in Corporate Performance and Policy, No. 4 Vol. (1), pp. 243–250.

Hopwood, A. G., (1987). The Archaeology of Accounting Systems. Accounting, Organizations and Society, No. 12 Vol. (3), pp. 207–234.

Hoskin, K. W. & Macve, R. H., (1986). Accounting and the Examination: A Genealogy of Disciplinary Power. Accounting, Organizations and Society, No. 11 Vol. (2), pp. 105–136.

Hughen, L., Lulseged, A. & Upton, D., (2014). Improving Stakeholder Value through Sustainability and Integrated Reporting. CPA Journal, March, pp. 57–61.

IIRC, (2013). The International Framework: Integrated Reporting. Available: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf [Accessed 1 October 2013].

IRCSA, (2011). Framework for Integrated Reporting and the Integrated Report. Available: www.sus tainabilitysa.org [Accessed 5 June 2012].

Jensen, M. (1986) Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, Vol. 76 No. (2), pp. 323-329.

Jones, M. J. & Solomon, J. F., (2013). Problematising Accounting for Biodiversity. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 26 Vol. (5), pp. 668–687.

King, M., (2016). Comments On: Integrated Reporting, GARI Conference. Henley on Thames, UK, 23 October.

KPMG, (2015). The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015. Available: https:// home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/11/kpmg-international-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015.html [Accessed 17 May 2017].

Lamberton, G., (2005). Sustainability Accounting – A Brief History and Conceptual Framework. Accounting Forum, No. 29 Vol. (1), pp. 7–26.

Lewis, N. R., Parker, L. D. & Sutcliffe, P., (1984). Financial Reporting to Employees: The Pattern of Development 1919 to 1979. Accounting, Organizations and Society, No. 9 Vol. (3–4), pp. 275–289.

LPEM FEB-UI (2022). Seri Analisis Makroekonomi: Indonesia Ekonomi Outlook. Triwulan-I 2022.

Mansoor, H. & Maroun, W., (2015). Biodiversity Reporting in the South African Food and mining sectors. In: 27th International Congress on Social and Environmental Accounting Research, 27 August 2015, Egham, United Kingdom. United Kingdom: Centre for Social and Environmental Accounting Research.

Marcia, A., Maroun, W. & Callaghan, C., (2015). Value Relevance and Corporate Responsibility Reporting in the South African Context: An Alternate View Post King-III. South African Journal of Economic and Management Sciences, No. 18 Vol. (4), pp. 500–518.

Maroun, W., (2017). Assuring the Integrated Report: Insights and Recommendations from Auditors and Preparers. The British Accounting Review, No. 49 Vol. (3), pp. 329–346.

Maroun, W., Coldwell, D. & Segal, M., (2014). SOX and the Transition from Apartheid to Democracy: South African Auditing Developments through the Lens of Modernity Theory. International Journal of Auditing, No. 18 Vol. (3), pp. 206–212.

Massie, R. K., (2010). Accounting and Accountability: Integrated Reporting and the Purpose of the Firm. In: R. G. Eccles, B. Cheng and D. Saltzman, eds. The Landscape of Integrated Reporting: Reflections and Next Steps. Cambridge, MA: The President and Fellows of Harvard College Cambridge, pp. 2–8.

McNally, M.-A., Cerbone, D. & Maroun, W., (2017). Exploring the Challenges of Preparing an Integrated Report. Meditari Accountancy Research, No. 25 Vol. (4), Forthcoming.

Michelon, G., Pilonato, S. & Ricceri, F., (2015). CSR Reporting Practices and the Quality of Disclosure: An Empirical Analysis. Critical Perspectives on Accounting, No. 33, pp. 59–78.

Milne, M. J. & Patten, D. M., (2002). Securing Organizational Legitimacy: An Experimental Decision Case Examining the Impact of Environmental Disclosures. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 15 Vol. (3), pp. 372–405.

Milne, M., Tregidga, H. & Walton, S., (2009) Words Not Actions! The Ideological Role of Sustainable Development Reporting. Accounting, Auditing and Accountability Journal, No. 22 Vol. (8), pp. 1211–1257.

Patten, D. M., (1992). Intra-industry Environmental Disclosures in Response to the Alaskan Oil Spill: A Note on Legitimacy Theory. Accounting, Organizations and Society, No. 17 Vol. (5), pp. 471–475.

PwC, (2014). Value Creation: The Journey Continues. A Survey of JSE Top-40 Companies’ Integrated Reports. Available: www.pwc.co.za/en/assets/pdf/integrated-reporting-survey-2014.pdf [Accessed 7 August 2015].

PwC, (2015). Integrated Reporting where to Next? Available: www.pwc.co.za/en/assets/pdf/inte grated-reporting-survey-2015.pdf [Accessed 16 February 2016].

Raemaekers, K., Maroun, W. & Padia, N., (2016). Risk Disclosures by South African Listed Companies Post-King III. South African Journal of Accounting Research, No. 30 Vol. (1), pp. 1–60.

Solomon, J., (2010). Corporate Governance and Accountability, 3rd ed. Bognor Regis, UK: John Wiley and Sons.

Solomon, J. & Maroun, W., (2012). Integrated Reporting: The New Face of Social, Ethical and Environmental Reporting in South Africa? London: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Available: www.researchgate.net/publication/236586863.

Stent, W. & Dowler, T., (2015). Early Assessments of the Gap between Integrated Reporting and Current Corporate Reporting. Meditari Accountancy Research, No. 23 Vol. (1), pp. 92–117.

Stubbs, W. & Higgins, C., (2014). Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 27 Vol. (7), pp. 1068–1089.

Summerhays, K. & De Villiers, C., (2012). Oil Company Annual Report Disclosure Responses to the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill. Journal of the Asia-Pacifi Centre for Environmental Accountability, No. 18 Vol. (2), pp. 103–130.

Thomson, I., (2015). ‘But Does Sustainability Need Capitalism or an Integrated Report’ A Commentary on ‘The International Integrated Reporting Council: A story of Failure’ by Flower, J. Critical Perspectives on Accounting, No. 27, pp. 18–22.

Thomson, I. & Bebbington, J., (2005). Social and Environmental Reporting in the UK: A Pedagogic Evaluation. Critical Perspectives on Accounting, No. 16 Vol. (5), pp. 507–533.

Tregidga, H., Milne, M. & Kearins, K., (2014). (Re)presenting ‘Sustainable Organizations’. Accounting, Organizations and Society, No. 39 Vol. (6), pp. 477–494.

Watts, R. L. & Zimmerman, J. L., (1976). Positive Accounting Theory. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Watts, R. L. & Zimmerman, J. L., (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. The Accounting Review, No. 53 Vol. (1), pp. 112–134.

**LAMPIRAN**

